UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERNIKAHAN (PERKAWINAN) DI TINJAU DARI MAQASHID SYARIAH

Nurhadi

Kandinat Doktoral Pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru,
STAI Al-Azhar Pekanbaru, Email: alhadicentre@yahoo.co.id

Abstrak

Zaman modern serta globalisasi digitalisasi mengantarkan manusia pada era baru, sehingga godaan demi godaan yang datang sebagai ujian dan kadang malapetaka bagi pelaku pernikahan. Sehingga tujuan pernikahan dalam Islam saat sekarang adalah sebagai upaya preventif agar terpelihara dari perbuatan melanggar hukum (zina dan perbuatan keji). Perkawinan dianjurkan bertujuan sebagai upaya memelihara diri dari perbuatan diharamkan, kelangsungan kehidupan manusia yang sehat sehingga rumah tangga dipenuhi kasih sayang serta saling membantu keduanya untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, juga upaya memelihara keutuhan manusia dari kerusakan akhlak dan moral. Adanya aturan hukum yang mengatur perkawinan agar umat Islam (manusia) hidup saling berpasang sesuai fitrahnya. Peraturan hukum yang menentukan prosedur yang dilalui, juga ketentuan hukum dan akibat hukumnya disebut hukum perkawinan. Inilah yang menjadikan penulis berupaya untuk menganalisis UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar perkawinan di Indonesia dari tinjauan maqashid syariah.

Metode Penelitian ini menggunakan konsep kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif secara *in-concreto* dan

sinkronisasi hukum, sedangkan jenis penelitian library Risert (kepastakaan), metode pengumpulan datanya adalah menggunakan data primer dan sekunder dan teknis analisis datanya adalah memakai metode contents analisis dengan alat ukurnya kemaslahatan (maqasid syariah).

Maqashid syariah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan memuat tiga substansi yaitu: 1). Maqashid al-Ammah: Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia (samara) berdasar Ketuhanan Maha Esa (Allah) dan perlunya pencatatan maqashidnya li hifzu al-Din wa al-Nasl wa al-Kitabah wa al-Mashlahah (memlihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan). 2). Maqashid al-Khassah: Fungsinya li al-Bayan al-Shahah fi al-Aqdi fi syiasyah al-Dauliyah (penegasan legalitas akad perkawinan secara hukum kenegaraan). 3). Maqashid al-Juziyah: Keadilanya li al-Adalati wa al-Hukmi baina al-Nas wa al-Khusus fi al-Muslim (keadilan semua umat khususnya muslim). Maqashid Kulliyah li hifzi al-Din (agama) wa al-Nafsi (jiwa) wa al-Aqli (akal) wa al-Nasl (keturunan) wa al-Mall (harta) wa al-'ardh (harga diri) dan al-'adl (keadilan) disempurnakan dengan al-kitabah (tertulis atau tercatat) supaya al-Ikhtiyari (sukarela), al-Amanah (menepati janji), al-Ikhtiyati (kehati-hatian), al-Luzum (tidak berubah), al-Taswiyah (kesetaraan), transparansi, al-Taysir (kemudahan) dan iktikad baik dalam akad perkawinan serta konsensualisme, tujuan akhirnya untuk ibadah dan kemaslahatan yaitu Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudratan).

Kata Kunci: *Undang-Undang No. 1 Th 1974, Perkawinan, Maqashid, Syariah.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Faktanya dalam kehidupan manusia bahwa dua orang berlainan jenis yaitu laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam rumah tangga, yang laki-laki disebut suami,

sedangkan yang perempuan di sebut isteri, keduanya menjadi pasangan hidup yang sah jika didasari dengan peraturan hukum kemanusiaan yang berlaku.¹

Perkawinan adalah lembaga formal yang melegitimasi pria dan wanita untuk hidup bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan dan ketenteraman rumah tangga salah satunya dapat ditentukan dengan hukum,² terutamahukum Islam (bagi orang Islam).³ Tidak hanya itu, menurut ketentuan yang berlaku bahwa pernikahan itu dianggap sah, kalau tercatat di Kantor Urusan Agama⁴ atau Kantor Catatan Sipil⁵ masing-masing domisili keduanya.⁶ Tujuan pencacatan perkawinan merupakan dasar hukum atas hak dan kewajiban dalam keluarga.⁷ Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap isteri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain.⁸

Zaman modern sekarang ini, serta globalisasi digitalisasi mengantarkan manusia pada era baru,⁹ sehingga godaan demi godaan yang datang sebagai ujian dan kadang malapetaka bagi pelaku pernikahan. Sehingga tujuan pernikahan dalam Islam saat sekarang adalah sebagai upaya preventif agar terpelihara dari perbuatan melanggar hukum (zina dan perbuatan

¹ Lihat Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dan 2 Bab I tentang Dasar Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 Bab II tentang Dasar Perkawinan. Didukung dengan Firman Allah surah al-Hujarat ayat 13:

Artinya: *Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.*

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 2005), hlm. 847

² Yaitu hukum Perdata BW dan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khusus selain muslim di Negara Indonesia.

³ Yaitu hukum Islam (KHI) juga UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan BW.

⁴ Bagi umat muslim

⁵ Selain umat muslim

⁶ Boleh domisili pihak laki-laki atau perempuan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh hukum atau pengadilan setempat

⁷ Lihat Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 30 s/d 34 Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 s/d 84 Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

⁸ Ahmad Nuryani, Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia, (Bandung: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage, 2010), hlm. 21

⁹ T.O. Ihromi, Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 284-301.

keji).¹⁰ Hikmah pengharaman zina diantaranya untuk menjaga kehormatan, mencegah percampuran nasab, mencegah banyaknya anak yang ditelantarkan orang tua, menjaga keutuhan dan ketenteraman dalam rumah tangga, pengharaman zina sesuai dengan fitrah manusia, mencegah menyebarnya kejahatan, khususnya pembunuhan dan mencegah penyebaran penyakit menular.¹¹

Perkawinan dianjurkan bertujuan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al-'irdh*) agar tidak terjerumus dalam perbuatan diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifzh an-nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemashlahatan bersama dunia dan akhirat.¹²

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³ Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁴

Menurut Imam al Ghazali, tujuan perkawinan antara lain untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang

¹⁰ Lihat surah al-Isra ayat 32:

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.* Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,...., hlm. 429

¹¹ Dikutip dan diselaraskan dari tulisan Ustadz Bachtiar Nasir, Minggu, 17 Juni 2012, dalam <http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/tujuh-hikmah-diharamkannya-zina/diakses-tanggal-8-agustus-2017-jam-20.30-wib>.

¹² Hussein Muhammad, Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender), (Yogyakarta : LKiS, 2007), hlm. 101

¹³ Lihat Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dan 2 Bab I tentang Dasar Perkawinan

¹⁴ Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 Bab II tentang Dasar Perkawinan.

tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁵

Perkawinan adalah upaya memelihara keutuhan manusia dari kerusakan akhlak dan moral. Adanya aturan hukum yang mengatur perkawinan agar umat Islam hidup saling berpasang sesuai fitrahnya.¹⁶ Peraturan hukum yang menentukan prosedur yang dilalui, juga ketentuan hukum yang menentukan akibat hukumnya disebut hukum perkawinan.¹⁷ Inilah yang menjadikan penulis berupaya untuk menganalisis UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi dasar perkawinan di Indonesia dari tinjauan maqashid syariah.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini “bagaimana maqashid syariah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ?

KAJIAN TEORI

A. Undang-Undang No. 1 Th 74 Tentang Perkawinan dalam Sejarah

1. Sejarah UU Perkawinan Pada Masa Kerajaan Islam di Indonesia

Islam adalah agama rahmat alilamin.¹⁸ Hukum Islam sebagai hukum yang bersifat mandiri telah menjadi satu kenyataan yang hidup dalam masyarakat Indonesia.¹⁹ Bahwa kerajaan-kerajaan Islam yang

¹⁵ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin*, (Beirut : Dar al Fikr, tt), hlm. 27-36

¹⁶ Lihat surah al-Hujarat ayat 13 diatas dan surah an-Nisa ayat 1: Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya [263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.* Keterangan: [263] maksud dari padanya menurut Juhur Mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,..., hlm. 114

¹⁷ Sajjito Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 146-147.

¹⁸ Lisat surah al-Anbiya ayat 107: Artinya: *Kami tidak mengutus engkau, Wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia.* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,..., hlm. 508

¹⁹ Rakyat Indonesia muslim meleburkan antara budaya dan syariat yang tidak bertentangan dengan agama

berdiri di Indonesia telah melaksanakan Hukum Islam dalam kekuasaannya masing-masing.²⁰

Sekitar abad ke 13 M, Kerajaan Samudra Pasei di Aceh Utara menganut hukum Islam Mazhab Syafi'i.²¹ Kemudian pada abad ke 15 dan 16 M di pantai utara Jawa, terdapat Kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel.²² Peranan dan fungsi pemeliharaan agama ditugaskan kepada penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan yang termasuk dalam hukum keluarga/perkawinan.²³ Sementara itu, di bagian timur Indonesia berdiri pula kerajaan-kerajaan Islam seperti Gowa, Ternate, Bima dan lain-lain. Masyarakat Islam di wilayah tersebut diperkirakan juga menganut hukum Islam Mazhab Syafi'i.²⁴

2. Sejarah UU Perkawinan Pada Masa Penjajahan Belanda di Indonesia

Ketika VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) datang ke *Indonesia*, kedudukan hukum (keluarga) Islam telah ada di masyarakat sehingga pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC.²⁵ Pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia, Belanda menghimpun hukum Islam yang disebut dengan *Compendium Freiyer*, mengikuti nama penghimpunnya.²⁶ Kemudian membuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makasar (Bone dan Gowa).²⁷ Ketika pemerintahan VOC berakhir, politik penguasa kolonial berangsur-angsur berubah terhadap hukum Islam.²⁸

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. XI

²¹ Hamka, *Sejarah Umat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Jilid II, hlm. 53

²² Hamka, *Sejarah Umat Islam*,..., hlm, 145-155

²³ Amrullah Ahmad SF dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 70.

²⁴ Mawarti Djoned Poesponegoro dkk, *Sejarah Nasional Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), Jilid III, hlm. 197.

²⁵ Bantara, Ratna Munti dkk, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: LBH- APIK, 2005), hlm. 7

²⁶ Arso Sosroatmodjo dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang , 1975), hlm. 11.

²⁷ Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (dalam Pembangunan no 2 Tahun ke XII, Maret 1982), hlm. 101.

²⁸

Ketika Kongres I Perempuan Indonesia pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta mengusulkan kepada Pemerintah Belanda agar segera disusun undang-undang perkawinan, namun mengalami hambatan dan mengganggu kekompakan dalam mengusir penjajah.²⁹ Arso Sosroatmojo mencatat bahwa pada rentang waktu 1928 kongres perempuan Indonesia telah mengadakan forum yang membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam.³⁰ Kemudian hal tersebut juga pernah dibicarakan pada dewan rakyat (*volksraad*).³¹

Permulaan awal tahun 1937 Pemerintahan Hindia Belanda menyusun rencana pendahuluan Ordonansi Perkawinan tercatat (*onwerpordonnantie op de ingeschreven huwelijken*) dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut: Perkawinan berdasarkan asas monogami dan perkawinan bubar karena salah satu pihak meninggal atau hilang selama dua tahun serta perceraian yang diputuskan oleh hakim.³² Menurut rencana rancangan ordonansi tersebut hanya diperuntukkan bagi golongan orang Indonesia yang beragama Islam dan yang beragama Hindu, Budha, Animis. Namun rancangan ordonansi tersebut di tolak oleh organisasi Islam karena isi ordonansi mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.³³

²⁹ Maria Ulfah Subadyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), hlm. 9-10.

³⁰ Keburukan-keburukan yang dimaksudkan yaitu antara lain: perkawinan kanak-kanak (anak di bawah umur), kawin paksa, poligami, talak sewenang-wenang dan lain-lain. Sementara menurut Khoiruddin Nasution respon perempuan Indonesia terhadap praktek perkawinan hukum Islam khususnya mengenai ketentuan hak dan kewajiban suami isteri disebabkan oleh ketentuan yang mengatur bahwa; a. suami berhak menahan isteri untuk tetap di rumah; b. bahwa isteri wajib patuh kepada suami; c. bahwa suami berhak memberikan pelajaran kepada isteri; d. bahwa isteri wajib memenuhi kebutuhan seks suami. Bandingkan antara Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 9 dan Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), hlm. 285

³¹ Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,..., hlm. 9

³² Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 77.

³³ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*,..., hlm. 85

3. Sejarah UU Perkawinan Pada Masa Awal Proklamasi Kemerdekaan

Sesudah proklamasi kemerdekaan, Pemerintah RI berusaha melakukan upaya perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan UU No: 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk bagi masyarakat beragama Islam. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama No: 4 tahun 1946 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU No: 22 Tahun 1947 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa idah agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali.³⁴

Bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen, mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana undang-undang perkawinan.³⁵ Maka akhirnya Menteri Agama membentuk Panitia Penyelidikan Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk.³⁶ Maka lahirlah Peraturan Pemerintah (PP) No: 19 tahun 1952 yang memungkinkan pemberian tunjangan pensiun bagi istri kedua, ketiga dan seterusnya.³⁷

Pada tahun 1961 tanggal 6 Mei, Menteri Kehakiman membentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang secara mendalam mengajukan konsep RUU Perkawinan, sehingga pada tanggal 28 Mei 1962 Lembaga hukum ini mengeluarkan rekomendasi

³⁴ Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*,..., hlm. 78-79

³⁵ Pada waktu itu ada dua RUU yang masuk ke DPR yaitu; a. RUU tentang Pokok-pokok Perkawinan Umat Islam dan; b. RUU tentang Ketentuan Pokok Perkawinan. Lihat Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,..., hlm. 10

³⁶ Kepanitiaan itu diketuai oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan, setelah mengalami beberapa perubahan personalia, maka pada tanggal 1 April 1961 dibentuklah panitia baru yang diketuai oleh Mr. H. Moh. Noer Poerwosoetjpto. Lihat Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*,..., hlm. 9

³⁷ Indriaswari Dyah Saptaningrum, *Sejarah UU No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender, dalam Perspektif Perempuan*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan, 2000), hlm. 53.

tentang asas-asas yang harus dijadikan prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia.³⁸ Kemudian diseminarkan oleh lembaga hukum tersebut pada tahun 1963 bekerjasama dengan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah perkawinan monogami namun masih dimungkinkan adanya perkawinan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Serta merekomendasikan batas minimum usia calon pengantin.³⁹

4. Sejarah UU Perkawinan Pada Masa Menjelang Pengesahannya

Tahun 1973 Fraksi Katolik di Parlemen menolak rancangan UU Perkawinan yang berdasarkan Islam. Konsep RUU Perkawinan khusus umat Islam yang disusun pada tahun 1967 dan rancangan 1968 yang berfungsi sebagai Rancangan Undang Undang Pokok Perkawinan yang di dalamnya mencakup materi yang diatur dalam Rancangan tahun 1967.⁴⁰ Akhirnya Pemerintah menarik kembali kedua rancangan dan mengajukan RUU Perkawinan yang baru pada tahun 1973.⁴¹

Pada 1973 tanggal 22 Desember, Menteri Agama mewakili Pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan yang di setuju DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan.⁴² Maka pada tanggal 2 Januari 1974, Presiden mengesahkan Undang-Undang tersebut dan diundangkan dalam Lembaran Negara

³⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 4-5.

³⁹ R. Soetedjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988), hlm. 18.

⁴⁰ Pemerintah meminta DPR untuk memusyawarahkan hal-hal yang belum kita temukan kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat. Apalagi hal-hal tersebut dianggap sangat erat hubungannya dengan keimanan dan ibadah, dimusyawarahkan untuk dapat dijadikan rumusan yang disepakati. Melihat keinginan dan kesediaan para anggota Dewan untuk memusyawarahkan rancangan undang-undang tentang perkawinan ini dengan baik, kita semua yakin, Dewan bersama-sama Pemerintah akan mampu mengatasi segala perbedaan yang ada, dan akan menghasilkan Undang-undang Perkawinan Nasional yang dicita-citakan semua pihak.

⁴¹ Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, Bandung, 1983), hlm. 98.

⁴² Adapun fraksi-fraksi yang terlibat yaitu Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Fraksi Persatuan Pembangunan. Lihat Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ..., hlm. 27

No: 1 tahun 1974 tanggal 2 Januari 1974.⁴³

Dalam masa kurang lebih 15 tahun, yakni menjelang disahkannya undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sampai menjelang lahirnya undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ada dua hal yang menonjol dalam perjalanan Peradilan Agama di Indonesia. Pertama, tentang proses lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Kedua, tentang lahirnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. sekarang telah diperbarui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁴⁴

B. Maqashid Syariah Perspektif Jasser Auda

Pakar maqashid Jasser Auda menawarkan beberapa konsep fiqih modern berlandaskan *Maqashid al-Syariah*. Agama Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan solusi untuk kehidupan manusia dunia akhirat agar seimbang. Model inilah yang dicoba ditawarkan oleh Jasser Auda, sehingga muncul teori bagaimana lahir sebuah konsep sistem hukum yang dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan Allah dan lebih bermanfaat bagi umat manusia.⁴⁵ Kitab *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Law: A system Approach* karangan Jasser Auda, mendefinisikan Maqashid pada empat karakter, yaitu:⁴⁶

1. Hikmah dibalik suatu Hukum.
2. Tujuan akhir yang baik yang hendak dicapai oleh Hukum.
3. Kelompok tujuannya ilahiyah dan konsep Moral yang menjadi basis dari hukum.
4. *Mashalih* atau Masalah

⁴³ Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, (Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003), hlm. 35-39.

⁴⁴ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia SPR*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 127

⁴⁵ Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*, (*al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin-Indonesia*), hlm. 56

⁴⁶ Jasser Auda, *Maqashid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (Herndon: IIIT, 2008), hlm. 33

Dalam empat karakter konsep *Maqashid* diatas Jasser Auda menilai bahwa prinsip kemanusiaan menjadi pokok paling utama tujuan syariah.⁴⁷

konsep *Maqashid* Jasser Auda mencoba dengan mengkonstruksi ulang teori klasik yang bersifat *protection and preservation* menuju pada teori *maqashid* yang mengacu pada *development and rights*. Teori *maqashid* yang bersifat hirarkis mengalamiperkembangan, terutama pada abad ke-20. Teori modern mengkritik klasifikasikebutuhan (*necessity*) di atas dengan beberapa alasan berikut ini: a) *scope* teori *maqashid* meliputi seluruh hukum Islam, b) lebih bersifat individual; c) tidak memasukkan nilai-nilai yang paling universal dan pokok, seperti keadilan dan kebebasan (*freedom*); d) dideduksi dari kajian literature *fiqhi*, bukan mengacu pada sumber original/*script*.⁴⁸Berikut ini gambaran teori *maqashid* kontemporer dari 3 dimensi modern :

1. Tingkatan *Maqashid al-Syariah* dalam Hukum Islam

Para ulama' kontemporer membagi *maqashid* kepada tiga tingkatan, yaitumaqasid 'amah (*General maqashid*/tujuan-tujuan umum), *maqashid khassah* (*Specific maqashid* /tujuan-tujuan khusus) dan *maqashid juz'iyah* (*Partial maqasid*/ tujuan-tujuan parsial).⁴⁹ *Maqashid 'amah* adalah nilai dan makna umum yang ada pada semua kondisi *tasyri'* atau di sebagian besarnya, seperti keadilan, kebebasan, keadilan dan kemudahan.⁵⁰*Maqashid khassah* adalah *maslahat* dan nilai yang ingin direalisasikan dalam satu bab khusus dalam syariah, seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam system keluarga, menakut-nakuti masyarakat dan efek jera dalam memberikan hukuman, menghilangkan *gharar* (ketidakjelasan) dalam *muamalat*, dan lainnya.⁵¹ Sedang *maqashid juz'iyah* adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri'an hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan hafalan dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang,

⁴⁷ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*,..., hlm. 59

⁴⁸ Galuh Nashrullah, dkk, *Konsep Maqashid Al-Syariah*,..., hlm. 56

⁴⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*,..., hlm. 36

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.,..., hlm. 37

menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit,⁵² bepergian atau lainnya, juga larangan umat muslim menimbun daging selama idul adha..⁵³

Kajian maqashid sinergi secara piramida *maqashid al-Syariah* terdiri dari tiga tingkatan, yaitu *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsniyah*.⁵⁴ Sedangkan penelitian para ulama' klasik, *al-Maqashid al-dharuriyah* dalam membuat syariah Islam terangkum dalam penjagaan lima hal pokok dalam kehidupan, yaitu:⁵⁵ menjaga agama (*hifzu al-din*), menjaga jiwa (*hifzual-nafs*), menjaga akal (*hifzual-'aql*), menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*) dan menjaga harta (*hifzual-mal*). Para ulama' klasik, semisal al-Ghazali dan al-Syatibi menyebutnya dengan *al-kulliyah al-khamsah* yang menurut mereka dianggap sebagai *usul al-syariah* dan merupakan tujuan umum dari pembuatan syariah tersebut.⁵⁶

Hampir seluruh ulama klasik dalam menyusun *maqashid al-Shari'ah* digambarkan seperti piramida, diawali dari *maqashid 'amah* sebagai pokoknya kemudian bercabang menjadi *maqashid khasah* dan puncaknya berakhir pada *maqashid juz'iyah*. Kemudian dari sisi yang lain dimulai dari *al-dharuriyah*, *hajiyyah* kemudian *tahsiniyah*.⁵⁷ Mereka menyusun urutan prioritas jika terjadi pertentangan antara *maqasid* satu dengan lainnya, maka diprioritaskan yang lebih kuat, yaitu mendahulukan penjagaan agama atas jiwa, akal dan seterusnya. Walaupun kelihatannya teori ini sederhana, namun ternyata aplikasi teori ini dalam realitas sangat sulit dan rumit.⁵⁸ Karena itu muncul pandangan lain di antara ulama kontemporer semisal Jamaludin 'Atiyah dan Jasser Auda yang berbeda dengan susunan klasik di atas. Mereka berpendapat bahwa *maqashid al-Syari'ah* dengan segala tingkatannya bukan merupakan

⁵² Ibid.

⁵³ Galuh Nashrullah, dkk, *Konsep Maqashid Al-Syariah*,..., hlm. 57

⁵⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*,..., hlm. 34

⁵⁵ Ibid. lihat juga Galuh Nashrullah, dkk, *Konsep Maqashid Al-Syariah*,..., hlm. 57

⁵⁶ Al-Ghazali, al-Mustasfā, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), hlm. 74.

⁵⁷ Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam dengan Maqashid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), hlm. 36-37

⁵⁸ Galuh Nashrullah, dkk, *Konsep Maqashid Al-Syariah*,..., hlm. 58

susunan/bangunan yang bersifat piramid, yang mana maqasid terbagi antara yang atas dengan yang bawah, namun ia merupakan lingkaran-lingkaran yang saling bertemu dan bersinggungan (*dawair mutadakhilah wa mutaqa'at'ah*), yang hubungannya saling terkait satu dengan lainnya.⁵⁹

Konsep *maqashid* agar dapat menjadi solusi penyelesaian permasalahan hukum Islam tidak boleh dibatasi pada apa yang telah ditetapkan oleh ulama klasik sebagaimana diuraikan atas. Hukum selalu perkembangan sesuai dengan perubahan zaman tentu saja akan berefek pada perubahan hukum pada saat zamanya.⁶⁰ Permasalahan pada masa klasik dianggap tidak urgen bisa jadi saat ini menjadi sangat urgen dan bernilai tinggi, sebagaimana terdapat dalam berbagai komoditas, jenis tumbuhan, jenis pekerjaan dan lainnya. Begitu juga, sesuatu pada kondisi dan tempat tertentu sangat berharga tetapi pada kondisi dan tempat yang lain menjadi tidak berharga.⁶¹

2. *Ta'lil Al-Ahkamdan Maqashid al-Syari'ah* serta *'Illat Hukum*

Menurut Jasser Auda *al-'illat* dalam konsep usul fiqih adalah "sifat yang dijadikan oleh *al-Syari'* (Pembuat syariah) sebagai *manat* (kaitan, patokan) bagi penetapan hukum berdasarkan persangkaan sebagai sarana merealisasikan tujuan Syariah dalam penetapan hukum".⁶² Atau "sifat yang tampak (*zahir*) dan terukur (*mundabit*) yang karenanya hukum ditetapkan".⁶³ Sesuai definisi di atas, para ahli usul fiqih mensyaratkan beberapa persyaratan suatu itu disebut *'illat*, secara umum ada empat syarat, yaitu sifat tersebut harus tampak (*zahir*), terukur (*mundabit*), bisa diberlakukan kepada realitas atau hal yang lain, tidak berlaku khusus (*muta'addiy*), dan *mu'tabarah* dalam arti tidak ada teks yang menunjukkan bahwa

sifat tersebut tidak dipakai.⁶⁴

Jumhur ulama usul fiqih berpedoman pada *ta'lil al-ahkam*, khususnya dalam bidang muamalah. Juga para ulama membedakan antara lingkup ibadah dan muamalah. Ruang lingkup ibadah, hukum asalnya adalah *ta'abbud* dan berpatokan pada *nash*, sedang dalam muamalah dan kebiasaan hukum asalnya adalah melihat kepada makna dan maqasid, sebagaimana kaidah:⁶⁵

Berkenaan dengan ini mereka membuat kaidah:⁶⁶

Artinya, hukum berputar bersama 'illat-nya, berlaku pada saat ada 'illat-nya dan tidak berlaku pada saat hilang 'illat-nya.

Dawud dan Ibn Hazm al-Dhahiri beserta pengikut mereka yang dikenal dengan madzhab Dhahiri menolak konsep *ta'lil al-ahkam*, mereka tidak mengaitkan hukum dan teks-teks syariah dengan *'illat* serta hanya mengajak supaya mengamalkan teks nash tanpa mencari *'illat* hukum, sehingga hukumnya sebagian tidak bisa diberlakukan pada selain obyek lain dari teks nash tersebut.⁶⁷ Mereka daud zhahiri kelompok yang menolak qiyas sebagai salah satu sumber hukum.⁶⁸ Kelompok yang hampir seide dengan mereka adalah ulama' yang mengakui *ta'lil al-ahkam*, namun mempersempit ruang lingkungannya hanya pada *illat* yang disebutkan pada teks nash saja, dan tidak memberlakukan *'illat* yang berdasar pada akal dan logika filsafat, sehingga mereka tidak lepas dari teks nash dan tidak melakukan qiyas kecuali yang ada *illatnya* ditetapkan dalam teks nash tersebut.⁶⁹

Konsep *ta'lil al-ahkam* merupakan dasar dari konsep *maqashid al-Syari'ah* sebagai filosofi penetapan hukum. Karena itu Madzhab al-Dhahiri

⁵⁹ Jasser Auda, *Maqashid al-Ahkam al-Shar'iyah wa 'Ilalaha*, diunduh dari http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf diakses pada 8 Agustus 2017 Jam 10 wib. Lihat juga Galuh Nashrullah, dkk, *Konsep Maqashid Al-Syariah*,..., hlm. 58

⁶⁰ Galuh Nashrullah, dkk, *Konsep Maqashid Al-Syariah*,..., hlm. 58

⁶¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah*,..., hlm. 21-24

⁶² Jasser Auda, *Maqa'id al-Ahkam*,..., hlm. 4.

⁶³ Yusuf Hamid al-Alim, *Al-Maqashid al-Am Li al-Syari'atal Islamiyyah*, (Saudi Arabiyah, al-Dar al-Alamiyyah li al-Kitab al-Islamiyyah, 1994), cet. I, hlm. 68

⁶⁴ Jasser Auda, *Maqa'id al-Ahkam*,..., hlm. 5. Lihat juga Galuh Nashrullah, dkk, *Konsep Maqashid Al-Syariah*,..., hlm. 59

⁶⁵ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Usul al-shari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), Juz II, hlm. 228. Lihat juga, al-Qardhawi, al-Siyasah al-Shar'iyah fi Dhaw' Nusus al-Shariah wa Maqasidiha, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), hlm. 272

⁶⁶ Al-Qardhawi, *al-Siyasah al-Shar'iyah fi Dhaw' Nusus al-Shariah wa Maqasidiha*,..., hlm. 228

⁶⁷ Galuh Nashrullah, dkk, *Konsep Maqashid Al-Syariah*,..., hlm. 59

⁶⁸ Yusuf Hamid al-Alim, *Al-Maqashid al-Am Li al-Syari'atal Islamiyyah*,..., hlm.126

⁶⁹ Jasser Auda, *Maqa'id al-Ahkam*,..., hlm. 14

menolak penggunaan *maqashid al-Syari'ah* dalam penentuan hukum, sebagaimana sebagian ulama' mengakui *maqashid al-Syari'ah*, namun membatasinya pada apa yang ada pada teks dan tidak membolehkan penggunaannya pada selain obyek teks tersebut. Sedangkan mayoritas ahli usul fiqih menekankan pentingnya penggunaan *maqashid al-Syari'ah* sebagai instrumen penetapan hukum berdasarkan pengakuan mereka pada *ta'lil alahkam*.⁷⁰

Seorang ulama kontemporer Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa *ta'lil al-ahkam* sertamengaitkan dengan teks nash juga hikmah serta kemaslahatan sudah menjadi kesepakatan (ijma') ulama'.⁷¹

Menjadikan *maqashid al-syari'ah* sebagai '*illat* sebagaimana di atas, menurut Jasser Auda kurang tepat. Hal ini karena *maqashid al-syari'ah* dan hikmah berbeda dengan '*illat* sebagaimana didefinisikan oleh ulama'. Walaupun '*illat* merupakan representasi dari *maqashid* dan hikmah, namun secara spesifik, ulama' klasik mensyaratkan '*illat* dengan empat syarat sebagaimana di atas, dan syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi pada *maqashid* dan *hikmat al-syari'ah*.⁷² Karena itu Auda menekankan pentingnya penggunaan *maqashid al-syari'ah* sebagai *manath* hukum sebagaimana '*illat*.⁷³ Dia mengusulkan alternatif kaidah baru sebagai pengganti kaidah lama, yaitu:⁷⁴

Artinya: *Hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah bersama maqa'hid (tujuan-tujuannya) sebagaimana ia bersama illat-nya, ada atau tidak ada.*

Secara tegas Jasser Auda berpendapat bahwa *maqashid al-syariah* dengan pendekatan system sebagai pisau analisis dalam kajian hukum Islam.⁷⁵

⁷⁰ Galuh Nashrullah, dkk, Konsep Maqashid Al-Syariah, ..., hlm. 60

⁷¹ Al-Qardhawi, al-Siyasah al-Shar'iyah fi Dhaw' Nusus al-Shariah wa Maqasidiha, ..., hlm. 262-263

⁷² Suara Muhammadiyah, Jasser Auda Paparkan Konsep Maqasid Syariah di Hadapan Ulama Tarjih Muhammadiyah, <http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/02/23/jasser-auda-paparkan-konsep-maqasid-syariah-di-hadapan-ulama-tarjih-muhammadiyah/diakses-tanggal-9-agustus-2017-jam-10.00-wib>.

⁷³ King Faisal Sulaiman, Maqasid Al Shariah Perspektif Jasser Auda (Akademisi-Direktur LEAD Indonesia Institute, 27 Februari, 2017), hlm. 2

⁷⁴ Galuh Nashrullah, dkk, Konsep Maqashid Al-Syariah, ..., hlm. 60

⁷⁵ Ibid., ..., hlm. 61

Menurut Jaser Auda, penggunaan *maqashid al-syari'ah* dengan pendekatan system ini harus memperhatikan semua komponen yang ada dalam system hukum Islam, yaitu *cognitive nature* (pemahaman dasar), *wholeness* (Keseluruhan), *openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy* (hirarki yang saling terkait), *multi-dimensionality* (multi dimensionalitas) dan *purposefulness* (orientasi tujuan) hukum Islam.⁷⁶

3. Konsep Maslahat dan Aplikasinya

Lima unsur pokok kehidupan manusia dapat terealisasi kemaslahatannya jika dipelihara agama atau keyakinan, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁷⁷ Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa al-Syatibi membagi urutan dan skala prioritas maslahat menjadi tiga urutan peringkat, yaitu *daruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*,⁷⁸ dari hasil penelaahannya secara lebih mendalam al-Syatibi menyimpulkan⁷⁹ bahwa keterkaitan antara tingkatan-tingkatan *almaqasid* dapat diuraikan sebagai berikut: (1) *maqashid daruriyat* merupakan dasar bagi *maqasid hajiyyat* dan *maqasid tahsiniyat*. (2) kerusakan pada *maqasid daruriyat* akan membawa kerusakan pula pada *maqasid hajiyyat* dan *maqasid tahsiniyat*. (3) sebaliknya, kerusakan pada *maqasid hajiyyat* dan *maqasid tahsiniyat* tidak dapat merusak *maqasid daruriyat*. (4) kerusakan pada *maqasid hajiyyat* dan *maqasid tahsiniyat* yang bersifat absolut terkadang dapat merusak *maqasid daruriyat*. (5) pemeliharaan *maqasid hajiyyat* dan *maqasid tahsiniyat* diperlukan demi pemeliharaan *maqasid daruriyat* secara tepat.⁸⁰ Dengan demikian, jika diperhatikan, ketiga tingkatan *al-maqasid* tersebut tidak dapat pisahkan satu sama lain. Tingkat *hajiyyat* merupakan penyempurnaan tingkat *daruriyat*, tingkat *tahsiniyat* merupakan penyempurnaan bagi tingkat *hajiyyat*, sedangkan *daruriyat* menjadi pokok *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.⁸¹

Saling keterkaitan antar ketiga kemaslahatan merupakan ruh yang ada dalam Islam, dan saling

⁷⁶ Jasser Auda, Maqasid al-Shariah, ..., hlm. 45-55

⁷⁷ Galuh Nashrullah, dkk, Konsep Maqashid Al-Syariah, ..., hlm. 61

⁷⁸ Hamka haq, Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 103

⁷⁹ Nurcholish Madjid, dkk. Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Fluralis (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 11

⁸⁰ Galuh Nashrullah, dkk, Konsep Maqashid Al-Syariah, ..., hlm. 61

⁸¹ Ibid.

menyempurnakan. Penekanan utama dalam kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan primer (*daruriyat*), karena menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap manusia untuk meneguhkan dimensi kemanusiaannya. Jika nilai-nilai tersebut dilanggar, maka dapat dipastikan bahwa hak dan identitas kemanusiaan akan berkurang, karena sejatinya, nilai-nilai tersebut harus menjadi pijakan politik, ekonomi dan keberagamaan, sehingga pandangan politik, ekonomi dan keberagamaan tidak berseberangan dengan isu-isu kemanusiaan, seperti kebebasan beragama, berpendapat dan berekspresi, hak reproduksi, hak hidup, hak atas kepemilikan harta benda dan lainnya.⁸²

Al-Mashalih menurut ahli ushul meliputi ibadah, muamalah, dan adat dalam tiga tingkatan, yaitu, *al-mashalih ad-dharuriyah* merupakan tingkatan pertama, *al-mashalih al-hajiyah* berada pada tingkatan kedua, dan terakhir *al-mashalih at-tahsiniah* sebagai pelengkap. Kegelisahan akan terjadi manakala kita mencermati karakteristik unsur-unsur pada tingkatan *ad-dharuri* dan *at-tahsini*.⁸³

Al-Dharuriyah terdiri dari lima unsur seperti disebutkan di atas, sebagian ahli ushul memasukkan *al-'ardh* (harga diri) dan *al-'adl* (keadilan). Lagi pula antara satu unsur dengan unsur yang lain masih sulit dibedakan.⁸⁴ Spesifikasi dari lima unsur tersebut juga tidak jelas terutama antara unsur-unsur tersebut dengan sumbernya.⁸⁵

Melihat pertimbangan ini, maka *al-ushul al-khamsah* (lima jenis *dharuriyat*) harus diposisikan pada tingkatan *al-qiyam al-akhlaqiyah al-'ulya* (nilai-nilai moral yang tertinggi). Sepertinya inspirasi sebagian kaum ushuli terutama Syatibi dengan *as-sabgahal-akhlaqiyah* (karakter etika) terhadap *al-ma'ani al-khamsah*, menggiring mereka untuk berpendapat bahwa semua agama sepakat untuk melindungi lima

unsur dalam *addharuriyat* dengan klaim bahwa kelima makna tersebut bersifat abadi dan diakui oleh fitrah manusia yang sehat.⁸⁶

Model-model *al-mashalih* sebenarnya, tidak terbatas hanya pada lima unsur, dan tidak mungkin terpisah dengan nilai-nilai moral (*al-qiyam al-akhlaqiyah*), disamping itu *makarim al-akhlaq* pun masuk ke semua tingkatan *al-mashalih* mengharuskan konstruksi baru dalam pengklasifikasian *al-mashalih*. Klasifikasi *al-mashalih*⁸⁷ yang relevan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat saat ini harus memenuhi kriteria berikut; (1) *qiyam al-naf'i wa ad-dharar* (nilai-nilai manfaat dan madarat).⁸⁸ Nilai-nilai (*al-qiyam*) yang masuk dalam kriteria ini adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan jiwa, kesehatan, keturunan, dan harta. (2) *qiyam al-husn wa al-qubh* (nilai-nilai baik dan buruk) atau dapat disebut *al-mashalih al-'aqliyah*. Artinya bahwa *al-ma'ani al-akhlaqiyah* dapat menegakkan berbagai kebajikan dan keburukan (*al-mahasin wa al-maqabih*) yang mencakup seluruh konstruksi kejiwaan dan intelektual. Kemaslahatan yang masuk dalam *al-ma'ani* ini tidak terbatas, antara lain rasa aman dan merdeka, pekerjaan, keselamatan, kebudayaan, dan dialog. (3) *qiyam as-salah wa al-fasad* (kerbaikan dan kerusakan) atau disebut *al-mashalih arruhiyah*. Artinya *al-ma'ani al-akhlaqiyah* yang dapat menegakkan semua *al-mashalih* dan *al-mafasid* dan mencakup seluruh potensi spritual dan moral. Termasuk dalam bagian ini adalah agama dari aspek spritual keagamaan, semisal *al-ihsan*, *ar-rahmah*, *al-mahabbah*, *khusyu'*, dan *tawadu'*.⁸⁹

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif,⁹⁰ dengan pendekatan yuridis normatif secara *in-*

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Asmuni, Studi Pemikiran al-Maqasid, ..., hlm. 174-174

⁸⁸ Galuh Nashrullah, dkk, Konsep Maqashid Al-Syariah, ..., hlm. 63

⁸⁹ Ibid., ..., hlm. 64

⁹⁰ Lexy J. Moleong dalam bukunya mengutip Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Lihat Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011), hlm. 29

*concreto*⁹¹ dan sinkronisasi hukum,⁹² sedangkan jenis penelitian *library Risert* (kepuustakaan).

B. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua data, yaitu data primer dokumen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai objek analisis dan data sekunder yaitu teori maqashid syariah sebagai subjek analisis.

C. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Metode pengumpulan datanya adalah menggunakan data primer dan sekunder dan teknis analisis datanya adalah memakai metode *contents analisis*⁹³ dengan alat ukurnya kemaslahatan (maqashid syariah).⁹⁴ Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer atau pendukung lainnya.⁹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqashid Syariah UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Tertulis dalam Pembukaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan setelah judul ungkapan “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” juga “Presiden Republik Indonesia” dengan huruf kapital (huruf besar), hal ini menunjukkan bahwa lahirnya UU ini tidak terlepas dari campur tangan Allah sebagai penguasa alam semesta,

⁹¹ Penelitian in-concreto Usaha untuk menemukan apakah hukumnya sesuai untuk diterapkan in-concreto guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan di mana peraturan hukum itu dapat ditemukan disebut dengan istilah legal research.

⁹² Penelitian sinkronisasi adalah penelitian yang dapat dilakukan dengan menelaah atau mengkaji peraturan perundang-undangan atau setara dengannya dalam suatu bidang tertentu, apakah berbagai peraturan perundang-undangan itu serasi secara vertikal ataupun secara horisontal. (Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1982), hlm. 252).

⁹³ Mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. (Lihat: Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm: 76-77).

⁹⁴ Mukhtar, Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif, (Jakarta: Referensi, 2013), hlm. 4

⁹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 52

sekaligus indikasi adanya nilai-nilai maqashid syariah dalam UU tersebut, kendatipun UU ini berlaku umum untuk semua warga Negara Indonesia, tapi juga digunakan sebagai hukum formil umat Islam, yang kemudian ditafsirkan dengan Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Pernikahan (perkawinan).⁹⁶

Selanjutnya ungkapan “Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga Negara” dan Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945:2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/ 1983” juga “Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. Hal ini juga mengindikasikan bahwa UU ini adalah hasil musyawarah DPR (perwakilan para ulama kalau dalam kajian syiasah syariah), didasarkan dengan falsafah Pancasila yang memang tidak bertentangan dengan syariat Islam, semangkin jelas bahwa UU ini mengandung nilai-nilai filosofis secara syariah, yaitu untuk kemaslahatan ummat, khususnya umat Islam, terutama kaum perempuan dan anak-anak hasil pernikahan,⁹⁷ hal inilah yang menjadi dasar peneliti untuk membuktikan bahwa UU No 1 tahun 1974 syarat dengan nilai-nilai maqashid syariah. Lalu bagaimana sebenarnya tinjauan maqashid syariah UU No 1 tahun 1974 tersebut, jika dikaji Bab demi Bab juga Pasal demi Pasal serta Ayat demi Ayat yang terdiri dari 14 bab 67 Pasal.⁹⁸

Bab I Dasar Perkawinan

Bab ini terdiri dari 5 Pasal Pasal 1 maqashidnya *li Hifzi al-Din wa al-Nasl* (menjaga agama dan keturunan).⁹⁹ Pasal 2 maqashidnya *li Hifzi al-Din wa*

⁹⁶ Silahkan lihat Lampiran dan Lembaran Negara dokumen UU No 1 th 74 ttg Perkawinan.

⁹⁷ Silahkan lihat kembali sejarah lahirnya UU No 1 th 74 ini

⁹⁸ Silahkan lihat Lampiran dan Lembaran Negara dokumen UU No 1 th 74 ttg Perkawinan.

⁹⁹ Lihat dalam penjelasan UU No 1 th 74 ttg Perkawinan Pasal 1 : Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, Pemeliharaan dan Pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

al-Nasl wa al-Mall (menjaga agama, keturunan dan hak harta), sedangkan perkawinan adalah termasuk akad, maka Pasal 2 ini mengandung asas *al-kitabah* (tertulis atau tercatat) supaya *al-Ikhtiyari* (sukarela), *al-Amanah* (menepati janji), *al-Ikhtiyati* (kehati-hatian), *al-Luzum* (tidak berubah), *al-Taswiyah* (kesetaraan), transparansi, *al-Taysir* (kemudahan) dan iktikad baik dalam akad.¹⁰⁰ Pasal 3,¹⁰¹ 4¹⁰² dan 5¹⁰³ maqashidnya

¹⁰⁰ Lihat dalam penjelasan UU No 1 th 74 ttg Perkawinan Pasal 2 : Dengan perurnusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini. Ayat (1) dan (2)

Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/ pejabat yang membantunya. Ayat (3) Dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan tatacara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tatacara pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi Peraturan Pemerintah ini.

¹⁰¹ Penjelasan nya : ayat 1). Undang-undang ini menganut asas monogami. Ayat 2). Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari salon suami mengizinkan adanya poligami. Ayat (3) Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.

¹⁰² Penjelasan Pasal 4: Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.

¹⁰³ Penjelasan Pasal 5 : Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja. Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan. Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan

li al-Adalah wa Hifzi al-Din wa al-Nasl (keadilan dan menjaga agama dan keturunan).

Bab II Syarat Perkawinan

Bab ini terdiri dari 7 Pasal, Pasal 6 ayat 1 s/d 6 maqashidnya *al-Ikhtiyari wa hifzi al-Nafs wa al-Nasl wa al-Din* (ayat 1 tujuannya sama ridho, memelihara jiwa ayat 2,¹⁰⁴ memelihara kekeluargaan atau keturunan ayat 3, 4 dan 5 serta memelihara agama ayat 6 nya).¹⁰⁵ Pasal 7 maqashidnya *hifzu al-Nafs wa al-Maslahah* (memelihara jiwa demi kemaslahatannya).¹⁰⁶ Pasal 8,¹⁰⁷ 9¹⁰⁸ dan 10 maqashidnya *hifzu al-Nasl wa*

tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.

¹⁰⁴ Penjelasan Pasal 6 Ayat (2) Huruf f : Surat kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang meliputi wilayah tempat kediaman suatu atau isteri terdahulu. Apabila Lurah/Kepala Desa tidak dapat memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan mengenai kematian itu, maka dapat diberikan keterangan lain yang sah, atau keterangan yang diberikan di bawah sumpah oleh yang bersangkutan di hadapan Pegawai Pencatat.

¹⁰⁵ Penjelasan nya ayat 1). Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan Perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini. Ayat 2 s/d 6 Cukup jelas.

¹⁰⁶ Penjelasan nya ayat 1). Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan. Ayat 2). Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku. Ayat 3). Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan "diberitahukan kepada mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya", adalah bahwa pemberitahuan mengenai adanya halangan perkawinan itu harus ditujukan dan disampaikan kepada salah satu daripada mereka itu yang datang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan.

¹⁰⁷ Penjelasan Pasal 8 : Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

¹⁰⁸ Penjelasan Pasal 9 : Pengumuman dilakukan : Di kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah

al-Ardh (memlihara keturunan dan kehormatan).¹⁰⁹ Pasal 11-12¹¹⁰ maqashidnya belum jelas karena belum diatur dalam aturan dan undang-undangya sampai saat ini belum ada, namun sudah difafsirkan dalam KHI masalah Iddah atau berkabung. Namun demikian bahwa setiap hukum mempunyai tujuan, maka maqashid Pasal 11-12 *li al-Ibahah wa al-Ihtiyati wa al-Taysir* (pleksibel).¹¹¹

Bab III Pencegahan Perkawinan

Bab ini terdiri dari 9 Pasal, Pasal 13 s/d 21 mengandung maqashid *Hifzu al-Din wa al-Nafs wa al-Nasl li al-Ihtiyati wa al-Kitabah li al-Maslahah* (menjaga agama, jiwa, keturunan untk kehati-hatian dan tercatat demi kemaslahatan semua keluarga) *wa dar'ul mafasid wa jalbu al-mashalih* (menolak kemudratan dan menegakkan kemaslahatan).¹¹²

tempat perkawinan dilangsungkan, dan Di kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

¹⁰⁹ Penjelasan Pasal 10: Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusannya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

¹¹⁰ Penjelasan Pasal 12 : Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

¹¹¹ Penjelasan Pasal 12 : Hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan yang ditentukan di dalam pasal ini merupakan ketentuan minimal sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai nomor akta, tanggal, bulan, tahun pendaftaran; jam, tanggal, bulan dan tahun pernikahan dilakukan; nama dan jabatan dari Pegawai Pencatat; tandatangan para mempelai Pegawai Pencatat; para saksi, dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya; bentuk dari maskawin atau izin Balai Harta Peninggalan bagi mereka yang memerlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf f; Persetujuan yang dimaksud di sini dinyatakan secara tertulis atas dasar sukarela, bebas dari tekanan, ancaman atau paksaan. Huruf g; Menteri HANKAM/PANGAB mengatur lebih lanjut mengenai Pejabat yang ditunjuknya yang berhak memberikan izin bagi anggota Angkatan Bersenjata.

¹¹² Penjelasan Pasal 22: Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Penjelasan Pasal 14 : Pasal ini berikut Pasal-pasal 15, 16, 17, dan 18 mengatur tentang cerai talak.

Penjelasan Pasal 16 : Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian

Bab IV Batalnya Perkawinan

Bab ini terdiri dari 7 Pasal, Pasal 22 s/d 28 mengandung maqashid *li hifzhi al-Din wa al-Nafs wa al-Nasl li al-Maslahah baina huma* (menjaga agama, jiwa, keturunan untuk kemaslahatan diantara kedua keluarga).¹¹³

Bab V Perjanjian Perkawinan

Bab ini terdiri dari 1 Pasal, Pasal 29 mengandung maqashid *hifzu al-Nafs wa al-Mall li Ihtiyati wa al-Amanah wa al-Kitabah li al-Maslahah* (menjaga diri, harta untuk kehati-hatian agar menepati janji secara tertulis untuk kemaslahatan kedua belah pihak).¹¹⁴

dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut.

Penjelasan Pasal 20 Ayat (1) Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

¹¹³ Penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri.

Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) Izin Pengadilan untuk memperkenankan suami-isteri tidak berdiam bersama dalam satu rumah hanya diberikan berdasarkan pertimbangan demi kebaikan suami-isteri itu beserta anak-anaknya. Ayat (2) Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian pula tugas kewajiban suami-isteri itu terhadap anak-anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami-isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami-isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga. Penjelasan Pasal 27 Ayat (4) Meskipun tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini

¹¹⁴ Penjelasan Pasal 29 : Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk taklik-talak. Ayat (1) Penetapan waktu yang singkat untuk mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian adalah sebagai usaha mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian. Karena makin cepat perkara itu dapat diselesaikan oleh Pengadilan makin baik, bukan saja bagi kedua suami-isteri itu melainkan bagi keluarga, dan apabila mereka mempunyai anak terutama bagi anak-anaknya. Ayat (2) Hendaknya jangka waktu antara penyampaian panggilan

Bab VI Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Bab ini terdiri dari 5 Pasal, Pasal 30 s/d 34 mengandung maqashid *hifzu al-ahli wa al-Nasl li al-Amanah wa al-Ikhtiyati wa al-Taswiyah* (menjaga keluarga dan ketutunan sebagai wujud menepati janji untuk kehati-hatian dan kesetaraan) dan *kemaslahatan yaitu Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid (bertransaksi untuk kemaslahatan umat dan menolak kemudratan)*.¹¹⁵

Bab VII Harta Benda Dalam Perkawinan

Bab ini terdiri dari 3 Pasal, Pasal 35 s/d 37 mengandung maqashid *hifzu al-Maal al-haqqi al-Jauzaini li al-Maslahah* (menjaga harta yang menjadi hak kedua belah pihak untuk kemaslahatan keduanya).¹¹⁶

dan sidang diatur agar baik pihak-pihak maupun saksi-saksi mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan guna menghadapi sidang tersebut. Terutama kepada tergugat harus diberi waktu yang cukup untuk memungkinkannya mempelajari secara baik isi gugatan.

¹¹⁵ Penjelasan Pasal 30 : Dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan isteri, dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/ rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan. Pasal 31 Ayat (2) Usaha untuk mendamaikan suami-isteri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu. Pasal 33 : Apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup. Pemeriksaan dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami atau isteri untuk melakukan perceraian.

¹¹⁶ Penjelasan Pasal 35 : Apabila perkawinan Putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing. Pasal 36 Ayat (1) Pengukuhan oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan Pengadilan Agama hanya dilakukan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hakim yang tetap. Dengan perkataan lain, maka terhadap suatu putusan Pengadilan Agama yang dimintakan banding atau kasasi, masih belum dilakukan pengukuhan. Pengukuhan tersebut bersifat administratif; Pengadilan Negeri tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Agama dimaksud. Pasal 37 : Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing; ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Mengingat, bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap

Bab VIII Putusnya Perkawinan Dan Akibatnya

Bab ini terdiri dari 4 Pasal, Pasal 38 s/d 41 mengandung maqashid *hifzu al-din wa al-Nafs wa al-Nasl li al-Amanah wa al-Luzum al-Mashlahah* (menjaga agama, jiwa, keluarga/keturunan untuk menepati janji ayah kepada anak-anaknya karena tetap kewajibannya untuk kemaslahatan anaknya).¹¹⁷

Bab IX Kedudukan Anak

Bab ini terdiri dari 3 Pasal, Pasal 42 s/d 44 mengandung maqashid *hifzu al-Nasl* (memelihara keluarga yaitu anak tanggung jawab ayah dan nasab ke ibu jika anak zina atau anak diluar nikah).¹¹⁸

Bab X Hak Dan Kewajiban Antara Orang Tua Dan Anak

Bab ini terdiri dari 5 Pasal, Pasal 45 s/d 49 mengandung maqashid *hifzu al-Nasl li al-Amanah wa al-Kitabahli al-Mashlahah* (memelihara keturunan

suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar Pengadilan.

¹¹⁷ Penjelasan Pasal 39 ayat 1). Cukup jelas. Ayat 2). Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk pereeraian adalah :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang libel berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak inelakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Ayat (2) Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu; ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu. Ayat 3. Cukup jelas. Pasal 41 : Huruf c sub iii : Apabila tidak mungkin diperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada sub i atau ii, maka dapat diusahakan suatu surat keterangan lain yakni sepanjang Pengadilan dapat menerimanya.

¹¹⁸ Penjelasan Pasal 44 : Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah

karena menepati janji sebagai orang tua dan anak secara tertulis demi kemaslahatan).¹¹⁹

Bab XI Perwalian

Bab ini terdiri dari 5 Pasal, Pasal 50 s/d 54 mengandung maqashid *hifzu al-Din wa al-Nasl wa Ijbar wa al-Amanah wa al-Ikhtiyati wa al-Luzum wa li al-Taysir li al-Maslahah* (menjaga agama, keturunan dan hak menjadi wali karena itu kewajiban supaya hati-hati sudah menjadi ketetapan walaupun bisa diwakilkan yaitu perwalian untuk kemaslahatan semuanya).

Bab XII Ketentuan-Ketentuan Lain

Bab ini terdiri 4 bagian dari 9 Pasal, bagian 1 s/d 4 dan Pasal 55 s/d 63 mengandung maqashid *hifzu al-Din wa al-Nafs wa al-Nasl li al-Mashlahah wa al-Taysir* (memlihara agama, jiwa dan keturunan untuk kemaslahatan juga untuk kemudahan sebagai solusi).

¹¹⁹ Penjelasan Pasal 45 : Dalam pasal ini diatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) dan 40 dan sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, dan 44. Pejabat Yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah). Pasal 47 : Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang telah ada, apabila telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Selain hal yang tersebut di atas maka dalam hal suatu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini telah diatur didalam peraturan perundangan tentang perkawinan yang ada maka diperlakukan Peraturan Pemerintah ini yakni apabila :

- peraturan perundangan yang telah ada memuat pengaturan yang sama dengan Peraturan Pemerintah;
- peraturan perundangan yang telah ada belum lengkap pengaturannya;
- peraturan perundangan yang telah ada bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49 ; Yang dimaksud dengan “kekuasaan” dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

Bab XIII Ketentuan Peralihan

Bab ini terdiri dari 2 Pasal, Pasal 64 dan 65 mengandung maqashid *al-Mashlahah* (kemaslahatan ummat).

Bab XIV Ketentuan Penutup

Bab ini terdiri dari 2 Pasal, Pasal 66 dan 67 mengandung maqashid *al-Mashlahah* (kemaslahatan ummat).

Dari keterangan Bab I s/d Bab XIV terangkum tiga tujuan utama (maqashid) dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu Tujuan, Fungsi dan Keadilan. Penjelasan sebagai berikut:

- Maqashid al-Ammah: Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia (samara) berdasar Ketuhanan Maha Esa (Allah) dan perlunya pencatatan maqashidnya li hifzu al-Din wa al-Nasl wa al-Kitabah wa al-Mashlahah (memlihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan).
- Maqashid al-Khassah: Fungsinya li al-Bayan al-Shahah fi al-Aqdi fi syiasyah al-Dauliyah (penegasan legalitas akad perkawinan secara hukum kenegaraan).
- Maqashid al-Juziyah: Keadilannya li al-Adalati wa al-Hukmi baina al-Nas wa al-Khusus fi al-Muslim (keadilan semua umat khususnya muslim).

KESIMPULAN

Maqashid syariah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan memuat tiga substansi yaitu: 1). Maqashid al-Ammah: Tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia (samara) berdasar Ketuhanan Maha Esa (Allah) dan perlunya pencatatan maqashidnya li hifzu al-Din wa al-Nasl wa al-Kitabah wa al-Mashlahah (memlihara agama, keturunan dan tercatat demi kemaslahatan). 2). Maqashid al-Khassah: Fungsinya li al-Bayan al-Shahah fi al-Aqdi fi syiasyah al-Dauliyah (penegasan legalitas akad perkawinan secara hukum kenegaraan). 3). Maqashid al-Juziyah: Keadilannya li al-Adalati wa al-Hukmi baina al-Nas wa al-Khusus fi

al-Muslim (keadilan semua umat khususnya muslim). Maqashid Kulliyah li hifzi al-Din (agama) wa al-Nafsi (jiwa) wa al-Aqli (akal) wa al-Nasl (keturunan) wa al-Mall (harta) wa al-'ardh (harga diri) dan al-'adl (keadilan) disempurnakan dengan al-kitabah (tertulis atau tercatat) supaya al-Ikhtiyari (sukarela), al-Amanah (menepati janji), al-Ikhtiyati (kehati-hatian), al-Luzum (tidak berubah), al-Taswiyah (kesetaraan), transparaansi, al-Taysir (kemudahan) dan iktikad baik dalam akad perkawinan serta konsensualisme, tujuan akhirnya untuk ibadah dan kemaslahatan yaitu Jalbul al-Mashalih wa Dar'ul al-Mafasid (menegakkan kemaslahatan dan menolak kemudratan).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2012)
-, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin*, (Beirut : Dar al Fikr, tt)
- Ahmad Nuryani, *Dasar Hukum Pencatatan Pernikahan di Indonesia*, (Bandung: Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedebage, 2010)
- Al-Ghazali, *al-Mustasfā*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993)
- Al-Qardhawi, *al-Siyasah al-Shar'iyyah fi Dhaw' Nusus al-Shariah wa Maqasidiha*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998)
- Al-Syatibi, *al-Muwafaqat Fī Usul al-shari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t), Juz II
- Amir Mu'allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Amrullah Ahmad SF dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978)
- Asmuni, *Studi Pemikiran al-Maqasid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)* (Jurnal Mawarid, Edisi XIV Tahun, 2005)
- Bantara, Ratna Munti dkk, *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: LBH- APIK, 2005)
- Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, Bandung, 1983)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 2005)
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia SPR*, Malang: UIN-Malang Press, 2009)
- Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)*, (al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin-Indonesia)
- Hamka haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Mashlahah Dalam Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta: Erlangga, 2009)
- Hamka, *Sejarah Umat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Jilid II
- Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, (Yogyakarta : LKiS, 2007)
- Indriaswari Dyah Saptaningrum, *Sejarah UU No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender, dalam Perspektif Perempuan*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan, 2000)
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam dengan Maqashid Syariah* (Bandung: PT. Mizan Pustaka,

- 2015)
 , *Maqashid al-Ahkam al-Shar'iyah wa 'Ilalaha*,
 diunduh dari [http://www.jasserauda.net/
 modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf](http://www.jasserauda.net/modules/Research_Articles/pdf/article1A.pdf)
 diakses pada 8 Agustus 2017 Jam 10 wib
- , *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic
 Law a System Approach*, (Herndon: IIIT, 2008)
- Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan
 Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Dengan
 Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta:
 Academia+Tazzafa, 2004)
- King Faisal Sulaiman, *Maqasid Al Shariah Perspektif
 JasserAuda* (Akademisi-Direktur LEAD Indonesia
 Institute, 27 Februari, 2017)
- Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,
 (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2011)
- Maria Ulfah Subadyo, *Perjuangan Untuk Mencapai
 Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Yayasan
 Idayu, 1981)
- Mawarti Djoned Poesponegoro dkk, *Sejarah Nasional
 Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka Departemen
 Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), Jilid III
- Moh Zahid, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan
 Undang-Undang Perkawinan*, (Dirjen Bimas
 Islam dan Penyelenggara Haji, 2003)
- Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam
 Sistem Hukum Indonesia*, (dalam Pembangunan
 no 2 Tahun ke XII, Maret 1982)
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif
 Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013)
- Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam
 Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia
 Indonesia, 1992)
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*,
 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989)
- Nurcholish Madjid, dkk. *Fiqih Lintas Agama:
 Membangun Masyarakat Inklusif Fluralis*
 (Jakarta: Paramadina, 2004)
- R. Soetedjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam
 Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*,
 (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988)
- Sajtipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*,
 (Bandung: Alumni, 1979)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum
 Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta:
 Rajawali Pers, 1985)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,
 (Jakarta: UI-Press, 1982)
- Suara Muhammadiyah, *Jasser Auda Paparkan
 Konsep Maqasid Syariah di Hadapan
 Ulama Tarjih Muhammadiyah*, [http://www.
 suaramuhammadiyah.id/2017/02/23/jasser-
 auda-paparkan-konsep-maqasid-syariah-
 di-hadapan-ulama-tarjih-muhammadiyah/
 diakses-tanggal-9-agustus-2017-jam-10.00](http://www.suaramuhammadiyah.id/2017/02/23/jasser-

 auda-paparkan-konsep-maqasid-syariah-

 di-hadapan-ulama-tarjih-muhammadiyah/

 diakses-tanggal-9-agustus-2017-jam-10.00) -
 wib.
- T.O.Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta:
 yayasan Obor Indonesia, 1999)
- Ustadz Bachtiar Nasir, Minggu, 17 Juni
 2012, dalam [http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/
 tujuh-hikmah-diharamkannya-zina/](http://muhsinhar.staff.umy.ac.id/

 tujuh-hikmah-diharamkannya-zina/), diakses-
 tanggal-8-agustus-2017-jam-20.30-wib.
- Yusuf Hamid al-Alim, *Al-Maqashid al-Am Li al-Syari'atal
 Islamiyyah*, (Saudi Arabiyah, al-Dar al-Alamiyyah
 li al-Kitab al-Islamiyyah, 1994), cet. I